

Pengaruh Akses Internet, Upah Minimum, Pendidikan, dan Akses Kredit Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi-Provinsi Indonesia

Ega Prima Putri¹, Sri Ulfa Sentosa²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Korespondensi: egaprmputri@gmail.com

Info Artikel

Diterima:

17 Februari 2025

Disetujui:

5 Maret 2025

Terbit daring:

16 Maret 2025

DOI: -

Sitasi:

Putri, E. P. & Sentosa, S. U. (2025). Pengaruh Akses Internet, Upah Minimum, Pendidikan, dan Akses Kredit Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi-Provinsi Indonesia

Abstract:

Development is an activity carried out by every country, especially in the context of economic development which aims to achieve social welfare or prosperity for the entire community. One of Indonesia's national development goals is to reduce the poverty rate. This study aims to determine the effect of Internet Access, Minimum Wage, Education and Access to Credit on Poverty in Indonesian Provinces. The type of data used in this study is secondary data using panel data which is a combination of Time series data from 2015 to 2023 and Cross section data of 34 Provinces in Indonesia. The data source used is obtained from the publication of the Central Bureau of Statistics (BPS). This research uses panel data regression analysis method. Based on the results of panel data regression analysis using the selected model is the Fixed Effect Model (FEM). The results of this study indicate that simultaneously Internet Access, Minimum Wage, Education and Access to Credit affect Poverty in Indonesian Provinces. Partially, Internet Access, Education, and Credit Access have a negative and significant effect on Poverty in Indonesian Provinces. Meanwhile, Minimum Wage has a positive and insignificant effect on Poverty in Indonesian Provinces.

Keywords: *Internet Access, Minimum Wage, Education, Access to Credit, Poverty*

Abstrak:

Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap negara, khususnya dalam rangka pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial atau kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akses Internet, Upah Minimum, Pendidikan, dan Akses Kredit terhadap Kemiskinan di Provinsi-Provinsi Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan menggunakan data panel yang merupakan gabungan dari data *Time series* 2015 sampai dengan tahun 2023 dan data *Cross section* 34 Provinsi di Indonesia. Sumber data yang digunakan diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan model terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Akses Internet, Upah Minimum, Pendidikan, dan Akses Kredit berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi-Provinsi Indonesia. Secara parsial Akses Internet, Pendidikan, dan Akses Kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi-Provinsi Indonesia. Sedangkan, Upah Minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi-Provinsi Indonesia.

Kata Kunci: Akses Internet, Upah Minimum, Pendidikan, Akses Kredit, Kemiskinan

Kode Klasifikasi JEL: J31, E24, I26, I32

PENDAHULUAN

Saat ini, model pembangunan yang diinginkan oleh suatu daerah dan negara adalah pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Karena, pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

(Todaro & Smith, 2011) mengemukakan bahwa pembangunan bukan hanya sekedar pembangunan ekonomi, tetapi pembangunan harus mampu membawa manusia melampaui prioritas material dan finansial dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu indikator untuk menilai capaian pembangunan pemerintah di suatu daerah adalah tingkat kemiskinan (Oktaviana et al., 2021).

Dalam berbagai forum, pembahasan mengenai kemiskinan di Indonesia banyak terfokus pada analisis penyebab kegagalan upaya pengentasan kemiskinan itu sendiri. Dengan memperbaiki faktor-faktor kegagalan tersebut, diharapkan tingkat kemiskinan dapat dikurangi dengan lebih efektif. Upaya penanggulangan masalah kemiskinan secepat mungkin, baik melalui tindakan pemerintah maupun pihak lain, bertujuan untuk mencegah dampak kemiskinan pada berbagai bidang, termasuk aspek sosial dan politik dalam masyarakat.

Teori Lingkaran Kemiskinan yang dikembangkan oleh Nurske dalam buku Mudrajat Kuncoro, "*a poor country is poor*" atau negara miskin tetap miskin karena kemiskinannya sendiri (Kuncoro, 2011). Variabel ekonomi yang mempengaruhi kemiskinan pada dasarnya menekankan bahwa "kondisi kemiskinan" tidak lepas dari rendahnya tingkat produktivitas yang mengakibatkan rendahnya pendapatan masyarakat. Rendahnya pendapatan ini pada gilirannya menyebabkan rendahnya tingkat tabungan, daya beli dan permintaan secara agregat, yang pada gilirannya menyebabkan kurangnya investasi karena prospek perekonomian yang kurang menarik. Kurangnya investasi ini berkontribusi pada rendahnya pembentukan modal bruto pada sektor penyediaan barang dan jasa, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya produktivitas.

Kemiskinan mengacu pada kondisi dimana masyarakat mengalami kekurangan nutrisi dan kesehatan yang buruk, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tinggal di daerah dengan lingkungan yang buruk dan berpenghasilan rendah (Todaro & Smith, 2011). Kemiskinan merupakan akar permasalahan dari banyak permasalahan sosial di masyarakat khususnya pada tiap-tiap provinsi di Indonesia. Keragaman kondisi sosial ekonomi antar provinsi masih menjadi tantangan besar oleh Indonesia.

Provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia umumnya memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi di pulau Jawa, hal ini sebagian disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pendidikan yang baik, layanan kesehatan dan peluang ekonomi. Di sisi lain, wilayah perkotaan di provinsi yang lebih maju menghadapi permasalahan kemiskinan perkotaan yang lebih kompleks, termasuk adanya permukiman kumuh dan sektor informal yang besar. Jika tidak ditangani dengan cepat, kemiskinan dapat

menjadi masalah yang berkelanjutan. Berikut data perkembangan kemiskinan menurut masing-masing provinsi di Indonesia:



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 (data diolah)

Gambar 1 Rata-Rata Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau di Indonesia Tahun 2015 – 2023

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan persentase penduduk miskin menurut pulau di Indonesia selama rentang waktu dari tahun 2015 hingga tahun 2023. Dapat dilihat kepulauan Papua menduduki posisi tertinggi tingkat kemiskinannya sebesar 24,94 persen. Pulau Kalimantan menduduki posisi terendah dengan persentase penduduk miskin paling sedikit dengan rata-rata persentase sebesar 6,04 persen. Fluktuasi tersebut menggambarkan kompleksitas tantangan penanggulangan kemiskinan antar provinsi di Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik serta kebijakan dan program pemerintah yang dilaksanakan pada periode tersebut.

Upaya penurunan angka kemiskinan menjadi fokus utama banyak pihak yang terlibat terutama pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan, salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menetapkan tujuan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam SDGs Indonesia yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030 (Dewi et al., 2023). Ketika menganalisis penyebab kemiskinan dari berbagai sudut, salah satu faktornya adalah akses informasi melalui internet yang menjadi salah satu hal penting di era teknologi yang terus berkembang pesat. Internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari yang digunakan untuk berbagai keperluan. Masyarakat memanfaatkan internet untuk mencari informasi atau berita, mengakses media sosial, serta membeli dan menjual barang dan jasa (Juairiyah, 2019). Menurut (Mushtaq, 2019) sejak akhir abad yang lalu, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya Internet, dipandang penting dalam menyediakan akses terhadap pasar, mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan pendapatan bagi sebagian masyarakat yang tinggal di negara-negara berkembang.

Pembangunan di bidang informasi dan komunikasi masih terus dilakukan, namun belum merata di semua tempat dan tidak dinikmati oleh semua orang sehingga menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan ini dapat menyebabkan kemiskinan informasi yang jika tidak ditangani dapat berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi, budaya dan sosial politik, khususnya di negara-negara berkembang (Himayah, 2013). Kemudian internet juga merupakan salah satu media yang dapat berfungsi sebagai alat untuk mengoptimalkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia (Purwatiningsih, Fatchiya dan Mulyandari, 2018).

Dampak teknologi digital terhadap perekonomian berkembang sangat pesat. Teknologi seperti internet telah diterima secara luas oleh masyarakat dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan input dan output secara lebih besar dan efisien. Teori marginal yang dikemukakan oleh Lewis mengatakan bahwa salah satu faktor yang membuat masyarakat di dunia miskin adalah budaya “hidup apa adanya”, seolah tidak peduli dengan kemajuan zaman. Dalam penelitian (Mora & Rivera, 2021) internet memiliki kemampuan untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. Masyarakat yang tergolong miskin seringkali mempunyai akses terbatas untuk mengakses informasi dengan cepat mengenai topik-topik yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Upah juga merupakan faktor yang mempengaruhi kemiskinan Dengan menerima upah, individu memiliki kemampuan untuk membeli produk konsumen, memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, dan mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Upah minimum merupakan salah satu cara untuk membantu individu mencapai standar hidup di daerahnya. Menurut Ragnar Nurkse dalam teori “Lingkaran Kemiskinan”, tingkat upah yang rendah dapat menimbulkan kemiskinan karena pekerja tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (Machmud, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad et al., 2022) upah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, upah yang tinggi memberikan pendapatan yang memadai bagi individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sebaliknya, upah yang rendah atau tidak mencukupi dapat menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yang dapat menyebabkan atau memperburuk kondisi kemiskinan.

Faktor selanjutnya adalah Pendidikan. Kemiskinan juga disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab peran setiap anggota keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya ambisi membangun masa depan. Masyarakat yang berpendidikan rendah cenderung

mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang terbatas. (Todaro & Smith, 2011) berpendapat bahwa pengentasan kemiskinan dapat dicapai dengan meningkatkan pembangunan pendidikan. Pencapaian tersebut dapat diukur dengan tingkat melek huruf dan tingkat pendidikan (atau lama belajar di sekolah). Pentingnya pendidikan sebagai investasi pada sumber daya manusia sama pentingnya dengan investasi pada modal fisik untuk keberhasilan ekonomi jangka panjang suatu negara (Mankiw et al., 2012). Penelitian yang dilakukan oleh (Oranga et al., 2020) dan (Marsinta et al., 2020) bahwa Pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.

Selain itu, akses kredit juga dapat mempengaruhi kemiskinan. Kemampuan untuk mengakses dan menggunakan layanan keuangan, seperti tabungan, pinjaman (kredit) dan asuransi, memainkan peran penting dalam membantu individu mengelola risiko keuangan sekaligus menciptakan peluang investasi. Pemberian pinjaman kredit dapat memberikan dampak positif bagi dunia usaha, seperti peningkatan pembelian bahan baku atau penerapan teknologi baru yang mendorong peningkatan produksi. Ketika produksi meningkat, penjualan cenderung meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan. Selain itu, penambahan modal kerja atau investasi baru memungkinkan terciptanya lapangan kerja baru.

Menurut (Todaro & Smith, 2011), salah satu strategi yang perlu diperhatikan untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan membantu masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha mikronya, terutama bagi mereka yang tidak bekerja di sektor pertanian. Pendanaan atau pinjaman kredit seringkali menjadi kendala bagi berkembangnya usaha kecil tersebut. Kemudian (Stegman, 2010) juga mengatakan bahwa akses terhadap keuangan dapat mendorong pemerataan ekonomi berkaitan dengan pencapaian keseimbangan ekonomi yang lebih luas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Pada penelitian (Westley et al., 2011) juga menunjukkan bahwa akses kredit yang lebih mudah bagi usaha mikro mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap distribusi pendapatan di suatu negara. Oleh karena itu, akses terhadap kredit dan layanan keuangan merupakan langkah penting dalam menghubungkan masyarakat miskin dengan kegiatan ekonomi yang lebih luas.

Berdasarkan permasalahan di atas dan didukung dengan temuan penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul Pengaruh akses internet, upah minimum, Pendidikan, dan akses kedit terhadap kemiskinan di Indonesia 2015 – 2023. Melalui analisis faktor-faktor tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan pada periode tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel, menggabungkan data time series periode 2015 hingga 2023 dan cross section 34 provinsi di Indonesia. Data yang dipakai dalam penelitian ini bersumber dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan dalam satuan persen sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen adalah akses internet dalam satuan persen, upah minimum dalam satuan juta rupiah, Pendidikan dalam satuan tahun, dan akses kredit dalam satuan persen. Analisis data yang dilakukan penelitian ini menggunakan alat Analisis Regresi Data Panel. (Basuki, 2016) menyebutkan regresi data panel merupakan teknik regresi yang menggabungkan data *time series* dan *cross-sectional*. Adapun model regresi dalam penelitian ini dapat dimodelkan sebagai berikut:

$$POV_{it} = \alpha + \beta_1 INT_{it} + \beta_2 LOG_UMP_{it} + \beta_3 EDU_{it} + \beta_4 CRE_{it} + \epsilon_{it} \quad (1)$$

Dimana POV merupakan Kemiskinan, INT merupakan Akses Internet, LOG_UMP merupakan Upah Minimum, EDU merupakan Pendidikan, CRE merupakan Akses Kredit, ϵ_{it} merupakan Error Term.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uji pemilihan model, model yang terpilih adalah menggunakan pendekatan Fixed Effect Model (FEM), sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.06006	7.014034	2.289703	0.0228
INT	-0.000275	5.27E-05	-5.212333	0.0000
LOG_UMP	0.578350	0.511270	1.131204	0.2590
EDU	-0.001187	0.000412	-2.882134	0.0043
CRE	-0.028116	0.007443	-3.777629	0.0002
R-squared			0.991840	
F-statistic			880.4060	
Prob(F-statistic)			0.000000	

Sumber: Hasil Olahan Data Eviews 12, 2024

Berdasarkan hasil regresi estimasi Fixed Effect Model pada tabel di atas maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$POV = 16.06006 - 0.000275INT + 0.578350LOG_UMP - 0.001187EDU - 0.028116CRE \quad (2)$$

Berdasarkan persamaan di atas menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 16.06 yang berarti adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Hal ini, juga mengindikasikan bahwa akses internet, upah minimum, Pendidikan, dan akses kredit

nol, maka tingkat kemiskinan meningkat sebesar 16.06 persen. Selanjutnya nilai probabilitas-F sebesar $0.00 < 0.05$ menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.99. Hal ini menunjukkan bahwa 99% variasi kemiskinan di Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel akses internet, upah minimum, Pendidikan, dan akses kredit, sedangkan 1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar cakupan penelitian ini.

Pengaruh Akses Internet Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akses internet berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di 34 provinsi Indonesia. Hal ini dikarenakan informasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian. Hal ini menunjukkan ketika akses internet meningkat maka tingkat kemiskinan akan turun begitu juga sebaliknya ketika akses internet turun maka tingkat kemiskinan akan meningkat.

Melalui informasi, individu atau kelompok dapat memperoleh manfaat yang besar untuk mempelajari hal-hal baru, memungkinkan masyarakat miskin belajar keterampilan baru, menerima informasi lowongan kerja, melihat peluang usaha, dan menjadi solusi bagi masyarakat miskin agar dapat menerima informasi yang lebih cepat dan lebih luas. Perkembangan internet juga memberikan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perekonomian global. Artinya, setiap orang mempunyai peluang untuk terlibat dalam berbagai sektor perekonomian, baik barang maupun jasa.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mayok & Rachmawati, 2023) menunjukkan bahwa akses internet berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Sama halnya dengan penelitian (Mora-Rivera & García-Mora, 2021) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa internet mampu menurunkan kemiskinan di daerah perdesaan maupun perkotaan di Meksiko. Ketika akses terhadap internet tinggi akan dapat meningkatkan produktivitas seseorang, karena dengan mudahnya mengakses informasi hal ini memungkinkan untuk lebih meningkatkan keterampilan, peluang baru, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas. Sejalan dengan teori lingkaran kemiskinan yang dikemukakan oleh Nurkse salah satu faktor yang dapat memutus lingkaran kemiskinan adalah tingkat produktivitas.

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa upah minimum provinsi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 34 provinsi Indonesia. Artinya, ketika terjadi kenaikan upah minimum justru meningkatkan tingkat kemiskinan dan begitu sebaliknya ketika upah minimum turun maka tingkat kemiskinan akan menurun.

Hal ini terjadi karena mayoritas pekerjaan masyarakat di Indonesia adalah bekerja pada sektor informal yang tidak terpengaruh langsung oleh kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Berdasarkan data tercatat per Agustus 2024 yang bekerja pada sektor informal sebesar 57,95%, sedangkan sektor formal mencakup sekitar 42,05% dari total tenaga kerja dan upah minimum berlaku di sektor formal, tidak semua sektor informal menerapkan upah minimum sebagai standar pemberian upahnya.

Di sisi lain, kenaikan UMP dapat berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang harus menyesuaikan biaya produksinya. Hal ini dapat menurunkan daya beli masyarakat, termasuk pekerja di sektor informal, sehingga rentan terhadap kemiskinan meskipun terjadi kenaikan upah di sektor formal.

Hal lainnya juga terjadi karena kondisi ekonomi, inflasi, dan kebijakan upah minimum di tiap provinsi Indonesia yang berbeda-beda menjadikan variasi yang besar dalam besaran upah minimum tiap provinsi. Di beberapa daerah, peraturan mengenai upah minimum tidak ditegakkan secara efektif, sehingga pekerja masih menerima upah di bawah standar yang ditetapkan. Hal ini membuat mereka sulit meningkatkan kesejahteraannya, sehingga upah minimum tidak langsung berdampak terhadap penduduk miskin.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rivana & Gani, 2024) mengemukakan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam jangka panjang, upah minimum provinsi belum dapat sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seseorang yang berpenghasilan tinggi belum tentu dapat dikategorikan sebagai individu kaya karena biaya hidupnya mungkin lebih besar atau bahkan melebihi pendapatan yang diterima. Oleh karena itu, kenaikan upah minimum belum tentu meningkatkan kesejahteraan secara signifikan. Selain itu, adanya inflasi dan biaya sosial menyebabkan harga barang dan jasa terus meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup (KHL).

Selain itu, standar hidup minimum dan nominal kebutuhan hidup layak mungkin belum mencukupi, sehingga masyarakat masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. (Lestari & Susana, 2021). Penelitian dengan hasil yang sama (Syahputri & Fisabilillah, 2023) mengemukakan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Kenaikan upah minimum tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan. Jika upah minimum naik, biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membayar pekerja juga ikut naik. Sebagai langkah efisiensi dan upaya menekan biaya operasional, perusahaan cenderung mengurangi jumlah pekerja, terutama yang dianggap kurang produktif. Akibatnya, sebagian pekerja kehilangan pekerjaan dan mengalami

penurunan pendapatan, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan mereka karena kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan yang ditunjukkan dengan Angka Melek Huruf (Aksara) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di 34 provinsi Indonesia. Ini berarti bahwa peningkatan Pendidikan akan menurunkan tingkat kemiskinan, begitu juga sebaliknya ketika Pendidikan menurun maka tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Surbakti P et al., 2023) mengemukakan bahwa Pendidikan dengan Angka Melek Huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pendapat ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Todaro & Smith, 2011), yang menyatakan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui pengembangan sektor pendidikan, salah satunya dengan meningkatkan tingkat melek aksara atau melek huruf.

Temuan penelitian ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh (Wiguna et al., 2021), yang menunjukkan bahwa angka melek huruf memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Bali. Dengan kata lain, semakin tinggi kemampuan seseorang dalam membaca, maka semakin rendah tingkat kemiskinan yang terjadi. Semakin tinggi angka melek huruf atau semakin banyak individu yang memiliki keterampilan membaca dan menulis, maka tingkat kemiskinan di Indonesia akan cenderung menurun.

Pengaruh Akses Kredit Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 34 provinsi Indonesia. Hal ini menunjukkan ketika akses kredit mengalami peningkatan maka tingkat kemiskinan akan menurun dan begitu juga sebaliknya ketika akses kredit menurun maka tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan.

Hasil dari penelitian dapat dikatakan bahwa kenaikan dalam mendapatkan akses kredit dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan selain tabungan, akses terhadap kredit dapat memberikan kesempatan kepada individu atau kelompok untuk memperoleh

modal usaha, mengembangkan usaha kecil atau membiayai pendidikan. Kemudian, adapun tujuan dari kredit mikro adalah untuk mengurangi kemiskinan dengan mendorong terciptanya kesempatan kerja mandiri bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Bauchet et al., 2015). Sehingga, akses terhadap kredit dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat mikro dan menengah, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan sehingga efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan (Alauddin, 2019).

Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sukomo & Prawiranegara, 2019) mengemukakan bahwa posisi kredit perbankan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kredit atau pembiayaan yang disalurkan perbankan kepada masyarakat di kabupaten dan kota di Jawa Barat mampu menurunkan angka kemiskinan. Hasil serupa yang dilakukan oleh (Félix & Belo, 2019) menunjukkan bahwa kredit mikro mampu mengurangi kemiskinan di 11 negara berkembang di Asia Tenggara termasuk Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan model *Fixed Effect Model* serta deskripsi hasil penelitian mengenai hubungan variabel independen terhadap variabel dependen seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Akses internet memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, hal ini menunjukkan ketika akses internet semakin meningkat maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan. Upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, hal ini berarti ketika upah minimum semakin meningkat maka tingkat kemiskinan juga akan mengalami peningkatan. Penetapan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penetapan upah minimum dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Dengan kebijakan ini, para pekerja diharapkan mendapat upah yang cukup layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin rendah tingkat kemiskinannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berperan penting dalam meningkatkan keterampilan, kesempatan kerja dan pendapatan, sehingga mengurangi jumlah masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin. Akses kredit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, hal ini berarti ketika terjadi peningkatan akses terhadap kredit maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan.

REFERENSI

- Ahmad, A., Timun, L., & Murfain, L. O. (2022). Analisis Pengaruh Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi, Nilai Tukar Petani, Daya Beli dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Provinsi di Sulawesi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 93–109. <https://jurnal.aksarakawana.com>
- Alauddin, M. (2019). FUNGSI UMKM DALAM MENINGKATKAN PREKONOMIAN MASYARAKAT. *Jurnal Qomaruddin Islamic Economy Magazine*, 5(1), 80–90.
- Basuki. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis : Dilengkapi Aplikasi Spss & Eviews*. PT Raja Grafindo Persada.
- Bauchet, J., Morduch, J., & Ravi, S. (2015). Failure vs. displacement: Why an innovative anti-poverty program showed no net impact in South India. *Journal of Development Economics*, 116, 1–16.
- Félix, E. G. S., & Belo, T. F. (2019). The impact of microcredit on poverty reduction in eleven developing countries in south-east Asia. *Journal of Multinational Financial Management*, 52–53. <https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2019.07.003>
- Himayah. (2013). INFORMATION POVERTY: KEMISKINAN INFORMASI DAN PERANAN PERPUSTAKAAN DALAM PENGENTASANNYA. *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 1, 115–121. <http://www.cddc.vt.edu/knownet/articles/heralding.htm>,
- Juairiyah, O. (2019). Analisis Alasan Penggunaan Internet Masyarakat Sumatera Selatan. *MULTITEK INDONESIA*, 2, 81–85.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*. STIM YKPN.
- Lestari, S., & Susana, R. R. (2021). ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN SERTA DAMPAKNYA PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAMBI. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1). <http://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id>
- Machmud, A. (2016). *Perekonomian Indonesia*. Erlangga.
- Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, P. (2012). *Principle of Economics: An Asian Edition*. Cengage Learning.
- Marsinta, A. A., Ario, B., & Fitra Ramadhan, A. (2020). Economics Development Analysis Journal Impact of Education on Poverty and Health : Evidence from Indonesia Article Information. *Economics Development Analysis Journal*, 9(1). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Mayok, B., & Rachmawati, L. (2023). THE IMPACT OF INTERNET ACCESS AND EDUCATION TO THE NUMBER OF POOR POPULATION IN INDONESIA. *Journal Of Economics*, 3(3), 39–48. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent>
- Mora-Rivera, J., & García-Mora, F. (2021). Internet access and poverty reduction: Evidence from rural and urban Mexico. *Telecommunications Policy*, 45(2). <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2020.102076>
- Mushtaq, R. (2019). Microfinance, Financial Inclusion and ICT: Implication for Poverty and Inequality Microfinance, Financial Inclusion and ICT: Implications for Poverty and Inequality. *Technology in Society*, 59.
- Oktaviana, D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, dan Pengangguran, terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Madiun. *Syntax Idea*, 3(5), 1034. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i5.1183>
- Oranga, J., Obuba, E., & Nyakundi, E. (2020). Education as an Instrument of Poverty Eradication in Kenya: Successes and Challenges. *Open Journal of Social Sciences*, 08(09), 410–424. <https://doi.org/10.4236/jss.2020.89031>
- Rivana, M., & Gani, I. (2024). INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia serta

- Upah Minimum terhadap Kemiskinan. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 20(1), 51–60.
- Stegman, M. A. (2010). *Savings for the Poor: The Hidden Benefits of Electronic Banking*. Brookins Institution Press.
- Sukomo, & Prawiranegara, B. (2019). ANALISIS POSISI KREDIT PERBANKAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA BARAT. *Journal of ManagementReview*, 1, 19–27. <https://doi.org/10.25157/mr.v3i3.2868>
- Surbakti P, S. P., Muchtar, M., & Sihombin, P. R. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2015-2021. *Ecoplan*, 6(1), 37–45.
- Syahputri, R. K. R., & Fisabilillah, L. W. P. (2023). Pengaruh Pengangguran, Upah Minimum, dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Journal Of Economics*, 2(2), 169–184. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed.). Erlangga.
- Westley, Glenn D, Palomas, & Martin, X. (2011). Is There a Business Case for Small Savers? *CGAP*.
- Wiguna, P. A., Putu, N., & Dewi, M. (2021). Analysis of the Effect of Literacy Rate, Inflation and Open Unemployment Rate on Poverty Levels in Bali Province in 2002-2020. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(8), 1–7. www.ajhssr.com